

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Pembatasan Ekspor Kelapa Sawit oleh Uni Eropa Pasca Kesepakatan Kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) II Tahun 2018 - 2022

Ni Nyoman Patris Lorensia ¹

Rendy Putra Kusuma ²

Elistania³

Abstract

This research aims at the action of the Indonesian government in dealing with restrictions on palm oil exports by the European Union after the Renewable Energy Directive (RED) II policy agreement in 2018-2022. The method used in this research is descriptive qualitative. This study makes use of liberalism perspective, commercial diplomacy theory and international trade cooperation concept. The research found that in dealing with the European Union's RED II policy, the action made by the Indonesian government were to use two main activities in Commercial Diplomacy, namely business support activities and policy makers.

Keywords: *palm oil, Renewable Energy Directive (RED) II, Indonesia, European Union, commercial diplomacy, export*

Pendahuluan

Perdagangan menjadi komponen yang tidak terpisahkan dalam hubungan internasional. Sikap saling ketergantungan negara terhadap pasar global telah menyebabkan perdagangan internasional semakin berkembang pesat. Begitu pula dengan Indonesia sangat bergantung dengan perdagangan internasional dalam sektor ekspor untuk

¹ Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Budi Luhur. Alamat Email: patris.lorensia@gmail.com.

² Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Budi Luhur.

³ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Budi Luhur.

menopang pertumbuhan ekonominya. Minyak kelapa sawit atau *crude palm oil* (CPO) adalah sektor nonmigas Indonesia yang saat ini menjadi produk ekspor andalan Indonesia dengan nilai ekspor sebesar USD 22,98 miliar (BPS, 2018). Saat ini Indonesia dikenal sebagai negara produsen sekaligus ekspor CPO terbesar di dunia yang memasok lebih dari setengah (sekitar 56%) dari total konsumsi CPO global tahun 2018 (USDA,2018). Hasil produksi CPO Indonesia sebagian besar diekspor ke negara-negara besar seperti Uni Eropa, China dan India (Alfiani, 2021: 1273). Namun, beberapa tahun belakangan industri sawit Indonesia justru tengah menghadapi berbagai tekanan dari Uni Eropa melalui kebijakan berstandar lingkungan untuk membatasi kegiatan ekspor CPO Indonesia menuju kawasan Uni Eropa. Uni Eropa (UE) juga dikenal menjadi salah satu tujuan potensial perdagangan Indonesia secara khusus ekspor sawit, tetapi sejak diterbitkannya kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II oleh Uni Eropa telah memosisikan CPO Indonesia berada dalam kondisi yang semakin sulit untuk dapat diterima di kawasan UE.

Kebijakan RED II merupakan *platform* energi terbarukan UE yang mendapatkan kesepakatan politik pada 14 Juni 2018, bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan berbasis *biofuel* sekaligus membatasi penggunaan *biofuel* yang menyebabkan deforestasi yang belaku pada periode 2021 – 2030 (European Commission, 2018) Kebijakan RED II secara resmi diterbitkan kedalam jurnal Komisi Eropa yang menargetkan capaian energi terbarukan yang harus digunakan dalam kawasan ini pada tahun 2030 sebesar 32% (European Commission,2018). Kebijakan RED II dilengkapi dengan aturan pelaksana atau Delegate Action yang membatasi sumber biofuel dengan kategori *high indirect land use change* (ILUC) risk atau berisiko tinggi terhadap alih fungsi lahan secara tidak langsung. Dalam *delegate Act* RED II ini secara tegas mengklasifikasikan CPO sebagai bahan bakar biofuel yang berisiko tinggi dan dikaitkan dengan tingkat deforestasi tertinggi yang terjadi selama periode 2008 – 2015, hal ini karena 45% dari ekspansi kelapa sawit terjadi di lahan gambut atau lahan yang tinggi stok karbon (Iswanto, 2021:35). Oleh karena itu Parlemen Uni Eropa berupaya membatasi penggunaan minyak kelapa sawit dalam bahan bakar terbarukan secara bertahap tahun 2023 dan menghapuskan penggunaannya di tahun 2030. CPO asal Indonesia juga dikenakan bea masuk imbalan (BMI) sebesar 8% – 18% untuk masuk pasar eropa, ini berlaku hingga 2024 dan berpotensi diperpanjang (Kementerian Perindustrian, 2021: 51).

Dengan dikeluarkannya kebijakan RED II tentunya merugikan industri sawit Indonesia terkait kapasitas produksi serta ekspor CPO, karena salah satu negara tujuan ekspor CPO terbesar Indonesia menghilang. Pasca hadirnya kebijakan RED II nilai ekspor sawit Indonesia ke UE sudah menunjukkan trend penurunan sebesar 15,85% pada tahun 2018 sebesar USD 2,14 turun menjadi USD 1,81 Miliar tahun 2019 (Kemenkomaritim, 2019). Kebijakan RED II juga memberikan tekanan bagi 19,5 Juta pekerja yang menggantungkan hidupnya dalam industri sawit. Maka saat ini seluruh atensi dari para pemangku kepentingan Indonesia difokuskan pada Isu sawit.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menyikapi kebijakan RED II menggunakan cara-cara damai melalui pendekatan diplomasi. Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia menyatakan, dalam melindungi kepentingan ekonomi strategis, maka isu kelapa sawit menjadi prioritas diplomasi Indonesia saat ini (CNN, 2019). Diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia lebih berorientasi pada aktivitas diplomasi komersial, karena mayoritas difokuskan melalui kegiatan promosi komoditas perdagangan kelapa sawit berkelanjutan di pasar global demi meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik, serta menumbuhkan narasi positif bahwa CPO tidak sama dengan apa yang dituduhkan dalam RED II yang cenderung mengarah pada kampanye negatif.

Hal ini juga bertujuan untuk menumbuhkan citra positif sawit Indonesia, keberlangsungan ekspor dan meningkatkan ekonomi Indonesia.

Diplomasi komersial pada dasarnya mengacu pada dua tindakan yang tertuju pada (1) pembuatan kebijakan (negosiasi perdagangan, penyelesaian sengketa dagang dan konsultasi perdagangan) lalu (2) aktivitas *business support* (mengacu pada public relation) (Kostecki & Naray, 2007: 1). Di berbagai kesempatan Presiden Indonesia seringkali menekankan perlunya para diplomat Indonesia mempraktikkan diplomasi ekonomi khususnya aspek diplomasi komersial yang seluruh pihak terkait diminta untuk mendorong promosi perdagangan (Sjahrir, 2021: 4). Pemerintah Indonesia secara aktif melakukan kegiatan dalam diplomasi komersial yang diimplementasikan melalui pertemuan bersama Pemerintah Uni Eropa di Belgia dalam negosiasi untuk memperkuat narasi yang baik tentang sawit. Pemerintah juga mengirim perwakilan kementerian untuk melakukan kunjungan resmi menuju beberapa anggota negara Uni Eropa yakni Belanda, Italia serta Spanyol dalam misi promosi perdagangan produk sawit berkelanjutan demi mengubah persepsi buruk atas sawit Indonesia di kawasan perdagangan Uni Eropa dengan memberikan edukasi tentang manfaat CPO untuk memenuhi keperluan pangan dan sumber energi.

Kebijakan RED II Uni Eropa membangun stigma negatif pasar global tentang produk kelapa sawit Indonesia, dalam hal ini perlu bagi Indonesia melakukan counter issue terhadap masalah tersebut sebagai antisipasi jangan sampai isu negatif sawit dianggap sebagai kebenaran (PASPI, 2018: 1206) Melalui aktivitas diplomasi komersial diharapkan bisa memberikan pengaruh kepada UE untuk dapat mempertimbangkan kembali kebijakan RED II. Berdasarkan pada latar belakang tersebut dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: "Bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pembatasan ekspor kelapa sawit oleh Uni Eropa pasca kesepakatan kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II tahun 2018 – 2022 ? Isu yang dibahas dalam tulisan ini difokuskan pada batasan waktu tahun 2018 – 2022, alasannya karena Uni Eropa di tahun 2018 mengeluarkan kebijakan Renewable Energy Directive (RED) II dan hingga tahun 2022 pemerintah Indonesia masih melakukan upaya strategis dalam menghadapi pembatasan perdagangan CPO dengan UE akibat kebijakan RED II.

Pembahasan

Perkembangan minyak kelapa sawit Indonesia dalam perdagangan minyak nabati global sangat dinamis dan revolusioner. Hal ini diukung oleh adanya pengembangan energi terbarukan (Renewable Energy) yang berasal dari *biofuel* yaitu bahan bakar yang berasal dari minyak nabati seperti sawit, kedelai, minyak repeseed dan minyak biji bunga matahari (Winanda, 2018: 2). Penggunaan *biofuel* sebagai *renewable energy* dipandang penting sebagai sebuah solusi dalam substitusi bahan bakar fosil yang ketersediaannya semakin menipis, serta membantu mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Saat ini pangsa konsumsi CPO sebagai bahan baku biofuel cakupannya relatif lebih luas apabila dibandingkan dengan minyak nabati lainnya. Hal ini karena produksi minyak kelapa sawit lebih efektif dan efisien. Dalam 1 hektar lahan perkebunan sawit mampu menghasilkan minyak hingga 4 ton minyak dan jumlah ini berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan hasil produksi minyak nabati lain. Seperti minyak kedelai yang dalam 1 hektar lahannya hanya mampu menghasilkan 0.4 ton (Veri, 2019: 2)

Namun beberapa tahun belakangan berbagai tindakan untuk menghambat laju aktivitas perdagangan CPO sebagai energi terbarukan semakin *massive* terjadi terutama di kawasan Uni Eropa. UE menetapkan suatu kebijakan pada industri biofuel di tahun 2018 untuk membantu mengurangi deforestasi dari emisi gas rumah kaca dengan mendorong

penggunaan energi terbarukan melalui kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED II). Kebijakan ini telah mengklasifikasikan secara implisit kelapa sawit sebagai penyebab deforestasi, klasifikasi ini didasarkan pada laporan Dewan dan Komisi Eropa yang berjudul *Report on the State of Expansion of Food Crop Production and Associated Tariffs Worldwide*. Laporan tersebut menemukan bahwa minyak sawit memicu deforestasi selama periode 2008 hingga 2015 (European Commission, 2018). Selain itu kandungan emisi ILUC sawit adalah 109 gCO_{2e}/MJ, kandungan ini tertinggi dari minyak nabati yang lain (minyak kedelai 94 gCO_{2e}/MJ, Rapseed Oil 80 gCO_{2e}/MJ dan sun flower oil 79 gCO_{2e}/MJ)(Woltjer, 2017). ILUC bisa terjadi apabila terjadi perubahan alih fungsi lahan dari pertanian tradisional atau hutan terkonversi menjadi lokasi menanam tanaman untuk biofuel, ini biasanya terdapat pada kawasan dengan stok karbon yang tinggi seperti lahan gambut, dimana kelapa sawit biasanya hanya bisa tumbuh di lahan gambut (Mayr, 2020)

Jika melihat kebelakang pada dasarnya kebijakan biofuel Uni Eropa sudah ada sejak tahun 2003, melalui *Directive on the Promotion of the Use of biofuels or other Renewable Fuels for Transport* (2003/30/EC) (European Commission, 2003). Tujuan dibentuknya directive ini sebagai bentuk mitigasi dampak penggunaan bahan bakar fosil yang dapat mengancam pasokan energi serta berakibat pada perubahan iklim global. Kebijakan ini menetapkan target penggunaan biofuel di sektor transportasi sebesar 2% di tahun 2005 dan 5,75% tahun 2010. Namun directive ini dikatakan belum efektif, karena saat itu kawasan UE hanya mampu mencapai target sebesar 1,1% tahun 2005. Maka kebijakan Directives 2003/30/EC ditinjau kembali dan diperbaharui menjadi Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the council of Europe 23 April 2009, yang kemudian dikenal dengan Renewable energy directive (RED) (Renewable Energy Directive, 2009). Dalam kebijakan RED I, UE menetapkan target penggunaan energi terbarukan biofuel sebesar 20% untuk tahun 2020. Kebijakan ini belum efektif karena tingkat pencapaian penggunaan biofuel negara anggota yang tidak merata, contoh Swedia 54,6% sedangkan Belanda 7,3% (Eurostat, 2022). Sehingga tahun 2018 Parlemen Eropa kembali merevisi draf RED I menjadi RED II dengan menambahkan pendekatan baru tentang ILUC serta memasukan pembatasan penggunaan biofuel minyak sawit di Eropa. Dalam RED II yang baru menargetkan 32% sumber energi di Uni Eropa akan berasal dari energi terbarukan yang ramah lingkungan pada tahun 2030 (European Commission, 2018). Untuk mencapai target tersebut Uni Eropa mempromosikan energi terbarukan dan membatasi kontribusi minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biofuel secara bertahap di tahun 2024 hingga 0% tahun 2030 (Dusser, 2019: 4)

Diterbitkannya kebijakan RED II pada tahun 2018 telah mengancam keberlanjutan industri CPO Indonesia. Industri kelapa sawit Indonesia yang besar telah berperan dalam menyerap banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dengan pembatasan RED II ini akan memberikan tekanan bagi 19 juta tenaga kerja Indonesia yang menggantungkan hidupnya dalam industri ini. (Kementerian Luar Negeri, 2019). Secara signifikan pasca kehadiran kebijakan RED II menyebabkan kapasitas ekspor sawit Indonesia ke Uni Eropa menunjukkan trend penurunan, dimana pada tahun 2018 volume ekspor CPO Indonesia ke UE sebesar 4.3 Juta ton, kemudian menjadi 2 juta ton di tahun 2019 (Kemendag, 2021). Bahkan harga CPO menurun ke posisi terendah dari perhitungan global sejak lima tahun belakangan. Di tahun 2019 harga CPO kurang dari US\$ 600/metrik ton, lebih tepatnya US\$ 595 per metrik ton (Kompas.com,2019). Selain itu pembatasan ekspor CPO juga menyebabkan stok CPO menumpuk di pasar global sedangkan produksi terus berlangsung. Menurut laporan UE tentang impor bahwa selama lima tahun belakangan penerapan RED II menghasilkan penumpukan stok cpo dalam pasar global

sebesar 11,04% dari keseluruhan perdagangan CPO saat ini. Jumlah ini setara 4,56 juta ton jika ditotalkan per tahun adalah 423,34 ribu ton (LIPI, 2018)

Adanya RED II juga memunculkan aksi negara-negara lain untuk mengikuti jalan Uni Eropa membatasi penggunaan CPO. GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) menyatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan UE telah menjadi contoh trend ekonomi global, maka banyak negara lainnya meniru tindakan Uni Eropa untuk mengatasi krisis ekonomi, pembatasan ekspor kelapa sawit ini akan memunculkan efek domino ke negara lain untuk ikut membatasi sawit (Buletin APBN, 2018). Pembatasan impor kelapa sawit Uni Eropa telah dipertimbangkan oleh negara Pakistan dan Jepang dalam menangani masalah lingkungan akibat minyak sawit (GAPKI, 2019). Dampak dari efek domino ini lebih jauh telah merusak citra dan daya beli kelapa sawit di pasar internasional.

Pemerintah Republik Indonesia merespond kebijakan terbaru yang bernama Renewable Energy Directive (RED II) Uni Eropa dengan upaya-upaya yang dilakukan menggunakan cara-cara yang damai melalui pendekatan diplomasi komersial. Diplomasi komersial memainkan peran penting dalam kontribusinya bagi peningkatan perdagangan internasional dan menemukan solusi terhadap konflik internasional yang berhubungan dengan pasar maupun non-pasar (ITDC, 2022). Tujuan utama dari diplomasi komersial adalah merepresentasikan negara dalam mempromosikan produk perdagangannya di pasar Internasional (Kostecki & Naray, 2007). Aktor yang terlibat dalam Diplomasi komersial meliputi pejabat pemerintah, antara lain kementerian terhubung dengan aktivitas perdagangan, juga diplomat/duta besar dan di luar pemerintahan ada aktor bisnis. Dengan diplomasi komersial aktivitas diplomasi dikatakan lebih tepat sasaran karena dilakukan langsung oleh aktor yang berkepentingan, serta lebih ampuh karena sifatnya informal, sehingga percakapan yang dibangun bisa lebih intens ketika bertukar informasi dan bisa mengurangi ketegangan saat negosiasi. Dalam diplomasi komersial negara merupakan aktor utama, walaupun berperan sebagai aktor utama, negara bukanlah aktor tunggal melainkan terdapat peran swasta, pelaku bisnis, individu, sistem perdagangan internasional (Kostecki & Naray, 2007).

Aktivitas commercial diplomasi dibagi menjadi dua yakni:

1. Kegiatan yang berkaitan dengan aktivitas pembuatan kebijakan perdagangan. Seperti pembuatan kebijakan kerja sama perdagangan, menghadiri atau melaksanakan suatu pertemuan internasional resmi untuk melakukan proses negosiasi, konsultasi perdagangan, ataupun penyelesaian hambatan perdagangan.
2. Kegiatan-kegiatan pendukung bisnis, seperti melaksanakan kegiatan promosi perdagangan melalui keterlibatan dalam pameran dagang, seminar dan pembuatan kampanye promosi sebagai upaya membangun citra positif negara serta melakukan kegiatan kunjungan resmi sebagai penunjang kegiatan bisnis.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pembatasan ekspor CPO dalam kebijakan RED II digambarkan dengan menggunakan dua bentuk kegiatan diplomasi komersial yang diharapkan dapat mempengaruhi pemerintah Uni Eropa agar dapat melakukan peninjauan atas kebijakan RED II

Upaya Pemerintah Indonesia Melalui Aktivitas yang Berhubungan dengan Pembuatan Kebijakan

Melaksanakan Pertemuan Resmi Council Palm Oil Producing Countries (CPOPC) untuk Joint Mission ke Eropa

Pada tanggal 28 Februari 2019, anggota CPOPC (Indonesia, Kolombia, dan Malaysia) mengikuti pertemuan tingkat menteri ke enam CPOPC di Jakarta. Partisipasi dalam pertemuan adalah perwakilan dari Kementerian Pertanian Kolombia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Menteri Industri Utama Malaysia. Secara khusus

dalam pertemuan ini membahas isu kelapa sawit yang mendapat tekanan berupa pembatasan ekspor kelapa sawit dalam RED II UE. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan Joint Mission ke UE (Kompas.com, 2019). CPOC melakukan Joint Mission pada tanggal 8 - 9 April 2019 di Brussels, Belgia. Kegiatan ini difokuskan sebagai diplomasi CPOC ke UE (Kementerian Luar Negeri, 2019). Point keberatan CPOC disampaikan langsung oleh pihak yang berkepentingan dalam pertemuan tersebut. CPOC merasa keberatan dengan kebijakan RED II UE yang menggolongkan sawit sebagai tanaman berisiko tinggi ILUC. Pertemuan menghasilkan rencana Komisi Eropa untuk mengkaji ulang kebijakan RED II tahun 2021 dan tahun 2023 Komisi Eropa akan melakukan revisi terhadap konsep *Delegated Act*. Dalam kurun waktu yang sama segala bentuk langkah yang diambil oleh *stakeholder* dari industri kelapa sawit akan dipertimbangkan lagi oleh pihak Uni Eropa.

Kerja Sama Indonesia dengan Belanda dalam Produksi Sawit Berkelanjutan

Di sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-74 yang diselenggarakan di New York pada 26 September 2019 dapat dimanfaatkan oleh Belanda dan Indonesia untuk bekerja sama dalam program pengembangan produksi sawit berkelanjutan dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU). Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri (Retno Marsudi), sedangkan Belanda diwakili oleh Menteri Perdagangan Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Belanda (Sigrid Kaag) (Akbar, 2020: 2). Belanda memiliki komitmen yang kuat dari MoU ini dalam mendorong peningkatan produk kelapa sawit Indonesia yang sudah disertifikasi saat diekspor, baik di pasar Belanda maupun cakupan yang lebih luas di pasar Eropa. Komitmen itu muncul beriringan dengan hadirnya sentimen negatif dan persepsi yang buruk atas industri kelapa sawit Indonesia setelah diterbitkannya RED II (Liputan 6, 2020). Belanda tidak mendukung tindakan pembatasan RED II atas pemakaian bahan bakar biofuel. Di sisi lain Belanda lebih mendukung minyak sawit yang ramah lingkungan (*sustainable*).

1. Pertemuan Indonesia dengan Uni Eropa dalam perundingan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership (IEU-CEPA) di Brussel, Belgia

Pada 2 hingga 6 Desember 2019 bertempat di Brussel, Belgia, Indonesia dan Uni Eropa melakukan perundingan dagang Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership (IEU-CEPA) yang ke-9. Di tengah perundingan tersebut Indonesia menyinggung isu kelapa sawit pasca kemunculan kebijakan RED II. Merespon hal tersebut, delegasi Uni Eropa (UE) melalui Helena Konig sebagai Ketua Runding UE turut menyampaikan kepada pemerintah Indonesia bahwa UE memahami betapa penting kelapa sawit bagi Indonesia. Selain itu, disebutkan bahwa Kabinet UE yang baru beserta parlemen Eropa akan lebih berfokus pada agenda "hijau" baik secara internal dan eksternal (DJPPPI, 2019)

2. Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN-UE KE-23 Dalam Pembentukan Joint Working Group (JWG)

Pada 1 Desember 2020, secara online dilakukan pertemuan tingkat menteri ASEAN-Uni Eropa ke-23. Sebanyak 23 Menteri Luar Negeri negara Uni Eropa dan 10 Menteri Luar Negeri negara ASEAN menghadiri pertemuan ini. Konferensi virtual ini menjadi kesempatan baik bagi Indonesia untuk mendiskusikan isu kelapa sawit. Menteri luar negeri Indonesia Retno Marsudi menyampaikan minyak kelapa sawit Indonesia telah mengedepankan aspek kelestarian lingkungan. Dilihat dari sisi penggunaan lahan yang lebih efisien dimana lahan yang dipakai sebesar 17 Juta hektar, sedangkan lahan yang digunakan minyak nabati lainnya lebih luas yakni 277 juta hektar. PTM ini berhasil melahirkan *Joint Working Group* yang berfokus

menganalisa aspek keberlanjutan minyak nabati dengan posisi yang setara dan adil dengan kelapa sawit (Kementerian Luar Negeri RI, 2020).

Upaya Pemerintah Indonesia melalui Aktivitas Pendukung Bisnis

Promosi Kelapa Sawit berkelanjutan PT Paya Pinang saat Kunjungan duta besar Jerman ke Perkebunan Sawit

Pada 10 Februari 2018 PT Paya Pinang sebagai perusahaan CPO terkemuka di Sumatera menerima kunjungan Duta Besar Jerman untuk Indonesia Michael Freiherr von Ungern-Sternberg. PT Paya Pinang Group yang diwakili direktur (Kacuk Sumarto) mengajak Dubes Jerman untuk mengunjungi perkebunan sawit perusahaan dan melihat bagaimana perkebunan telah dikelola secara baik serta berkelanjutan. Sejak berlangsungnya kunjungan ada beberapa hal yang turut disampaikan pihak perusahaan bahwa CPO Indonesia berkomitmen meningkatkan standar pengelolaan perkebunan sesuai ISPO, perkebunan cpo tidak dioperasikan dengan mengkonversikan hutan melainkan mengelola kembali lahan yang ada. Selanjutnya meminta Industri CPO diperlakukan secara adil atau setara dengan minyak nabati lainnya. Setelah pemaparan tersebut, penggunaan ISPO mendapat pujian dan support dari Dubes Jerman karena sudah memuat landasan untuk menerapkan keberlanjutan yang ditetapkan berdasarkan aturan pemerintah dalam ISPO. Menanggapi pembatasan CPO di RED II, duta besar Jerman menyatakan dukungannya untuk memperlakukan CPO secara adil. Sikap ini membantu mengalahkan *massive*-nya kampanye negatif di benua Eropa. Dubes Jerman di akhir kunjungannya menyarankan untuk mengintensifkan komunikasi industri sawit dengan diskusi lanjutan bersama *stakeholder* sawit (BPDP, 2018).

1. Kunjungan kerja Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI dengan Uni Eropa di Brussels, Belgia.

Pada tanggal 13 April 2018 delegasi DPR RI melakukan kunjungan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) ke Parlemen Uni Eropa di Brussels, Belgia dengan membawa misi untuk memperjuangkan CPO Indonesia di pasar Uni Eropa. Delegasi Indonesia membangun dialog yang positif, berkelanjutan dan paralel dengan tiga institusi Uni Eropa (Parlemen Eropa, Dewan Eropa dan Komisi Eropa) selama berlangsungnya pertemuan. Delegasi DPR RI menyampaikan sikap keberatan terkait kebijakan RED II yang menimbulkan kerugian signifikan bukan hanya bagi pelaku bisnis industri minyak kelapa sawit, tetapi juga para petani kelapa sawit. Delegasi DPR RI meminta perhatian Parlemen Eropa atas isi kebijakan RED II terkait aksi *phase out* bagi produk biofuel berbahan baku CPO di tahun 2030. Parlemen Eropa meresponnya dengan menyampaikan kepada delegasi Indonesia bahwa kebijakan RED II UE belum sepenuhnya final dan Uni Eropa tengah melaksanakan tahap perundingan antara institusi UE, kemudian Indonesia diminta agar dapat memberikan data serta informasi yang valid dan relevan mengenai kelapa sawit, hal ini karena isu yang banyak berkembang menyebutkan bahwa CPO adalah produk yang tidak berkelanjutan dan ramah lingkungan (Dewan Perwakilan Rakyat RI, 2018)

2. Kunjungan Menko Maritim Ke Vatikan untuk Konferensi Internasional Tentang Sawit

Pada 24 April 2018 Menko Kemaritiman Luhut B. Panjaitan melakukan kunjungan kenegaraan ke Vatikan dalam misi perundingan pembatasan perdagangan CPO ke Uni Eropa, sekaligus meminta dukungan agar CPO tidak dilarang masuk ke pasar Uni Eropa. Pihak yang ditemui dalam kunjungan tersebut yakni Kardinal Peter Turkson sebagai Direktur Lembaga Kepausan Keadilan dan Perdamaian Vatikan. Kardinal Turkson akan membantu Indonesia dengan memfasilitasi konferensi yang

akan membahas Industri kelapa sawit yang menghadapi diskriminasi di Uni Eropa. Pada 15 Mei 2018 dilaksanakan konferensi di Urban University Roma, Italia. Tema yang digunakan dalam konferensi adalah "Pemberantasan Kemiskinan Melalui Industri Perkebunan dan Pertanian untuk Memperkuat Perdamaian dan Kemanusiaan" (Kementerian Luar Negeri, 2018) Konferensi ini menjadi sarana pertukaran pikiran secara intelektual antara pemangku kepentingan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan mewujudkan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan. Selama berlangsungnya konferensi, delegasi Indonesia memaparkan fakta industri kelapa sawit telah berkontribusi menopang pertumbuhan ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja Indonesia sebesar 19 juta orang. Berbagai upaya juga dilakukan delegasi Indonesia untuk meyakinkan Vatikan bahwa kelapa sawit bukan penyebab deforestasi dunia seperti yang disampaikan Uni Eropa. Selama ini pengolahan sawit Indonesia yang di ekspor ke Uni Eropa telah dilaksanakan secara lestari melalui penerapan uji sertifikasi ISPO, sedangkan *vegetable oil* seperti minyak bunga matahari, kedelai dan *rapeseed* bahkan tidak memiliki sistem sertifikasi. Konferensi menyepakati berbagai hal antara lain, menghindari terjadinya praktik diskriminasi perdagangan artinya tidak satupun komoditas atau industri pertanian dapat didiskriminasi dan dikucilkan dan menyepakati bahwa perkebunan kelapa sawit berperan penting dalam mengentaskan masalah kemiskinan (Liputan 6, 2018)

3. Kunjungan Duta Besar Negara-Negara Uni Eropa dalam Program Eksekutif Kelapa Sawit di Perusahaan Asian Agri, Jambi

Pada tanggal 16 hingga 18 april 2018 telah terselenggara Program Eksekutif Kelapa Sawit oleh kementerian Luar Negeri bersama perusahaan kelapa sawit Asian Agri dalam rangka menyambut kunjungan resmi Duta Besar beberapa negara Uni Eropa ke Industri sawit Jambi. Program ini bertujuan memberikan informasi yang akurat kepada delegasi Uni Eropa (UE) tentang fakta pengelolaan CPO berkelanjutan di Indonesia. Dubes Uni Eropa bagi Indonesia beserta sembilan diplomat negara-negara di Uni Eropa difasilitasi untuk melihat secara langsung praktik pengelolaan sawit berkelanjutan (Asian Agri, 2018). Asian Agri memperlihatkan secara langsung kepada delegasi Uni Eropa tentang praktik pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan mulai dari pembenihan hingga menjadi CPO. Perusahaan menggunakan Sertifikasi ISPO ketika mengoperasikan perkebunan sawit tetap berfokus pada aspek kelestarian lingkungan. Vincent Guerend sebagai Duta besar Uni Eropa di Indonesia memberikan respon positif ketika melihat manajemen industri Asian Agri yang bisa mengoptimalkan semua prosedur penting, termasuk kelangsungan jangka panjang perusahaan dan lingkungan. Delegasi Uni Eropa yang hadir sepakat bahwa Indonesia telah mencapai langkah signifikan dalam mengelola produksi minyak sawit berkelanjutan, dan kedepannya sekiranya langkah-langkah ini perlu dipertahankan.

4. Promosi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam Pameran Warsawa Humanitarian Polandia Pada tanggal 11 hingga 13 Juni 2019 Indonesia berpartisipasi dalam pameran Warsaw Humanitarian di Polandia. Tema yang diusung Indonesia di area paviliunnya adalah "Indonesia Sustainable Palm Oil, it's Contributions to SDGs" untuk menunjukkan kepada publik bagaimana minyak sawit berkelanjutan Indonesia melalui ISPO dapat mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs dapat tercapai (ISPO, 2018). Di area paviliun Indonesia disajikan data untuk memberi pemahaman kepada publik bahwa minyak sawit telah banyak dipakai di sebagian besar produk dalam kehidupan. Ditampilkan juga bagaimana sektor perkebunan sawit di Indonesia berperan bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian terhadap lingkungan hidup, serta jauh lebih penting meningkatkan taraf hidup masyarakat. Partisipasi aktif Indonesia dalam pameran di Polandia mendapat tanggapan positif dari masyarakat lokal maupun global. Pemerintah Polandia meyakini bahwa ada banyak penyebab lain yang juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan deforestasi. Jadi tidak semua kerusakan lingkungan harus dikaitkan dengan Industri kelapa sawit. Dukungan Pemerintah Polandia ditunjukkan melalui kunjungan resmi perwakilan Polish-Indonesia Parliamentary (Mr. Bartosz Kownacki) tanggal 24 Oktober 2019 di tempat kerja Wakil Ketua DPR RI, Jakarta (Sawit Indonesia, 2022). Pertemuan tersebut menyetujui peningkatan kerjasama investasi perdagangan antara Polandia dengan Indonesia di sektor kelapa sawit.
5. Promosi Kelapa Sawit Berkelanjutan ISPO dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia dengan Perwakilan Uni Eropa di Jakarta
Pada 2 Juni 2021 Menteri Luar Negeri Indonesia (Retno Marsudi) melaksanakan pertemuan tatap muka bersama Kepala Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa Josep Borrell di Jakarta. Selama berlangsungnya pertemuan, hal yang dibahas Indonesia dan UE berhubungan dengan kerjasama di bidang ekonomi, langkah penanggulangan covid 19 bersama, hingga isu kelapa sawit pasca RED II (CNN Indonesia, 2021). Dalam kesempatannya Menteri Luar Negeri Indonesia menyampaikan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam memproduksi kelapa sawit yang berkelanjutan melalui penguatan Indonesia Sustainable Palm Oil/ISPO yang merupakan kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan daya saing CPO Indonesia di pasar global. Dengan ISPO menjadi bukti bahwa tata kelola sawit Indonesia sudah memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan. Menlu Indonesia juga menyampaikan kepada delegasi UE bahwa penting untuk membangun kerja sama ekonomi dan perdagangan tidak diskriminatif, adil serta transparan dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi (CNBC, 2021). Permintaan Indonesia adalah agar CPO Indonesia dapat diperlakukan setara dan adil dengan minyak nabati lainnya, dan tidak seperti apa yang dituduhkan UE dalam kebijakan RED II. Permintaan tersebut ditanggapi positif oleh delegasi Uni Eropa yang mengapresiasi pengetahuan teknis terkait pengelolaan kelapa sawit berkelanjutan serta produktif yang dimiliki oleh para pelaku Industri sawit Indonesia melalui ISPO. Kepala Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Uni Eropa (Josep Borrell) turut menyampaikan bahwa tindakan yang dilakukan UE bukan melarang impor CPO Indonesia, tetapi masalah ini berkaitan dengan keberlanjutan atau sustainability yang harus diselesaikan secara bersama-sama.

Pembatasan Uni Eropa terhadap ekspor CPO asal Indonesia mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan usaha diplomatik intensif yang ditujukan kepada pemerintah UE. Dalam melihat masalah ini, dapat dianalisis bahwa Pemerintah

Indonesia memfokuskan dengan memilih jalur Diplomasi Komersial untuk menghadapi kebijakan RED II, dan hal ini didasari dengan instrumen atau kegiatan-kegiatan yang ada dalam kerangka diplomasi komersial berkaitan dengan pembuatan kebijakan dan pendukung bisnis. Melalui kegiatan diplomasi Komersial terlihat bahwa dalam praktiknya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah Indonesia saja tetapi turut melibatkan peran swasta dalam hal ini para pengusaha Industri kelapa sawit yaitu Asian Agri dan PT Paya Pinang yang berperan dalam menerima kegiatan kunjungan para duta besar negara-negara Uni Eropa untuk melihat secara langsung praktik pengelolaan terbaik yang diterapkan oleh perusahaan sawit Indonesia. Sesuai dengan diplomasi komersial dimana negara dan swasta dewasa ini semakin saling berhubungan satu sama lain dalam menghadapi isu perdagangan serta untuk menciptakan tatanan kebijakan yang dalam hal ini adalah upaya menghadapi pembatasan ekspor sawit Uni Eropa. Sinergi antara Pemerintah Indonesia dengan pengusaha sawit berperan dalam menentukan keberhasilan dari diplomasi komersial, dalam hal ini tujuan diplomasi komersial yang dilakukan Indonesia adalah demi keberlangsungan ekspor Industri sawit Indonesia ke Uni Eropa dan mendorong terciptanya kesejahteraan petani serta mengurangi tingkat kemiskinan. Dari beberapa upaya dengan menggunakan diplomasi komersial yang dilakukan Pemerintah Indonesia, telah memunculkan respon dari Parlemen Eropa yang berencana akan melakukan tinjauan atau revisi ulang tentang kebijakan RED II di tahun 2023. Perwakilan Tinggi UE untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, Josep Borrell kembali membuat pernyataan yang menyatakan bahwa UE tidak membatasi impor CPO dari Indonesia, kelapa sawit tidak didiskriminasi dalam pasar Uni Eropa dan perlakuan yang diberikan UE kepada semua minyak nabati adalah adil. Isu yang diangkat ini bukanlah soal pelarangan impor CPO melainkan masalah berkelanjutan industri kelapa sawit itu sendiri.

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia sudah mengintensifkan serangkaian upaya-upaya dalam menghadapi strategi jangka panjang RED II dengan inisiasi diplomasi komersial. Para pemangku kepentingan negara seperti kementerian luar negeri sudah memanfaatkan forum kerjasama Internasional seperti ASEAN-UE untuk dapat berdiskusi dan bernegosiasi langsung dengan UE agar menempatkan CPO dalam posisi yang adil dan setara dengan *vegetable oil* lainnya. Pihak Indonesia juga melakukan kunjungan kenegaraan dengan pemerintah UE di Brussel Belgia, untuk menyampaikan secara langsung keluhan Indonesia atas kebijakan RED II. Beberapa menteri terkait Indonesia juga ditugaskan melakukan pertemuan resmi ke beberapa negara di Uni Eropa, seperti Italia, Polandia, dalam misi meyakinkan serta memperkenalkan keunggulan CPO berkelanjutan yang diproduksi Indonesia, penyampaian dari delegasi Indonesia ini difasilitasi melalui seminar dan pameran sawit berkelanjutan yang pada akhirnya bisa menarik perhatian publik dan menghasilkan beberapa kerjasama bilateral yang mendukung Upaya Indonesia. Kelompok bisnis juga turut berperan membantu pemerintah dalam menjalankan diplomasi komersialnya dengan fasilitas industri yang disediakan selama kunjungan delegasi UE ke Industri sawit dan secara langsung mengamati praktik pengolahan sawit berkelanjutan. Dampak dari beberapa upaya diplomasi komersial yang dijalankan Indonesia sejauh ini sudah menunjukkan kemajuan positif dan dukungan serta respon baik dari beberapa pemangku kepentingan Uni Eropa yaitu:

1. Belanda bekerja sama dalam program pengembangan produksi sawit berkelanjutan dengan Indonesia dan bersedia mendukung upaya Indonesia dalam menghadapi kampanye negatif UE terhadap sawit dengan kampanye positif.

2. Rencana Komisi Eropa untuk mengkaji ulang kebijakan RED II di tahun 2021 dan pada tahun 2023 Komisi Eropa akan melakukan revisi terhadap konsep *Delegated Act*
3. Vatikan memfasilitasi konferensi di Roma bagi Pemerintah Indonesia dalam membahas industri kelapa sawit yang menghadapi diskriminasi di Uni Eropa.
4. UE menyetujui pembentukan *Joint Working Group* dengan Indonesia dalam menganalisis aspek keberlanjutan minyak nabati dengan posisi yang setara dan adil dengan kelapa sawit.
5. Polandia menyetujui peningkatan kerjasama investasi perdagangan dengan Indonesia di sektor kelapa sawit. Pemerintah Polandia meyakini bahwa tidak semua kerusakan lingkungan harus dikaitkan dengan Industri kelapa sawit

Sejatinya Indonesia sudah berupaya maksimal untuk dapat mempengaruhi Uni Eropa terkait kebijakan RED II nya. Untuk mencapai tingkat keberhasilan dari upaya pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi komersial memerlukan sinergi serta kolaborasi yang membangun bersama pemangku kepentingan. Sampai saat ini Pemerintah Indonesia terus mengupayakan promosi besar-besaran terkait minyak kelapa sawit yang ramah lingkungan agar isu negatif yang disebarkan oleh negara-negara Eropa bisa teratasi dan mengembalikan citra kelapa sawit. Segala upaya ini dilakukan pemerintah Indonesia karena komoditas sawit sangat penting bagi Indonesia dengan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian.

Referensi

- Afiani, Imara Nur, 2021." Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Merespon RED II" *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2 (8) : 1273
- Ali Akbar, Moh , 2020. " Kepentingan Indonesia dalam Kerjasama Ekspor Crude Palm Oil yang Berkelanjutan dengan Belanda" *JOM Fisip*, 7 (2): 2
- Asian Agri*, (2018),"Dukung Promosi Sawit Berkelanjutan Asian Agri Tegaskan Komitmen Menjadi MitraPemerintah"<https://www.asianagri.com/wp-content/uploads/2019/01/19.01.09-Dukung-Promosi-Sawit-Berkelanjutan-Asian-Agri-Tegaskan-Komitmen-Menjadi-Mitra-Pemerintah.pdf>, diakses 25 Juni 2022
- BPDP*, (2019) "Bahas Sawit, Uni Eropa Paham Posisi Indonesia", <https://www.bpdp.or.id/bahas-sawit-uni-eropa-pahami-posisi-indonesia> diakses 30 Juli 2022
- CNN*. (2019)."Menlu Janji Perjuangkan Kepentingan Sawit Indonesia". <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20191029161325106443835/menlu-janji-perjuangkan-kepentingan-sawit-indonesiadiakses> 23 April 2022
- Dewan Perwakilan Rakyat RI*, (2018), "Kebijakan Parlemen Uni Eropa Terkait Sawit Rugikan Indonesia",<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/20521/t/Kebijakan+Parlemen+Uni+Eropa+Terkait+Sawit+Rugikan+Indonesia> diakses 30 Juli 2022
- Direktorat Jendral Perundingan Perdagangan Internasional*, (2019), "Putaran ke-9 Perundingan Dagang Indonesia-EU CEPA: Wamendag Optimis Percepat Penyelesaian Perundingan",<https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/berita/detail/putaran-ke-9-perundingan-dagang-indonesia-eu-cepa-wamendag-optimis-percepat-penyelesaian-perundingan> diakses 29 Juli 2022
- Dusser, Philippe (2019), "Review The European Energy Policy for 2020-2030 RED II : What Future for Vegetable Oil as A Source of Bioenergy?", *Oilseeds and Fats, Crops and Lipids Journal*, 26 (51) : 4.

- European Commission. (2003), "Directive 2003/30/EC of the European Parliament and of the council of 8 May 2003 on the promotion of the use of biofuels or other renewable fuels for transport, *Official Journal of European Union*, L 123"
- European Commission. (2018). "DIRECTIVE (EU) 2018/2001 of The European Parliament and of the Council of 11 December 2018" *Official Journal of European Union*, L 328/82 : 2
- GAPKI. (2019). "Upaya Ubah Diskriminasi Sawit Uni Eropa (UE) :Indonesia Jangan Gelap Mata", <https://gapki.id/news/14684/upaya-ubah-diskriminasi-sawit-uni-eropa-ue-indonesia-jangan-gelap-mata> diakses 28 mei 2022
- Iswanto, Priyo, 2021. "Diplomasi Sawit Indonesia" *Jurnal Hubungan Luar Negeri* 6 (1) : 35.
- ITDC, (2022),"Commercial Diplomacy" <https://www.commercialdiplomacy.com/about/>, dikses 16 Maret 2022
- Kementerian Koordinator Perekonomian dan Maritim RI. (2019). "Pemerintah Gandeng Pengusaha Uni Eropa Hadapi Diskriminasi Sawit". <https://ekon.go.id/publikasi/detail/1221/pemerintah-gandeng-pengusaha-uni-eropa-> diakses 24 April 2022
- Kementerian Luar Negeri RI. (2019). Kajian Mandiri 2019. Peran Diplomasi Dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Nasional: Tinjauan Terhadap Pengelolaan Industri Minyak Nabati,
- Kementrian Luar Negri RI. (2019). "Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) : Mekanisme Untuk Mencapai Sustainable Development Goals 2030". <https://kemlu.go.id/warsaw/id/news/1050/indonesian-sustainable-palm-oil-ispo-mekanisme-untuk-mencapai-sustainable-development-goals-sdgs-2030> diakses 24 Juni 2022
- Kementrian Perindustrian RI. (2021). Tantangan dan Prospek Hilirisasi Sawit Nasional. Edisi ke VI Jakarta : Pusdatin Kemenperin.
- Kompas. (2019). "Negara Produsen CPO Tempuh Dialog Lewat Misi Bersama". <https://www.kompas.id/baca/utama/2019/02/28/negara-produsen-cpo-tempuh-dialog-lewat-misi-bersama/>, diakses 23 Juni 2022
- Kostecki, Michael & Olivier, Naray. (2007). *Commercial Diplomacy and International Business*, Netherlands : Institute of International Relations Clingendael
- Lipi. (2019). "Dampak Penerapan RED II Terhadap Perekonomian Indonesia",<http://psdr.lipi.go.id/news/dampakpenerapan-red-ii-terhadap-perekenomian-indonesia.html> diakses 28 Mei 2022
- Liputan 6, (2018), Menko Luhut : Vatikan Akan Bantu RI Hadapi Larangan Produk Sawit Masuk ke Uni Eropa,<https://m.liputan6.com/bisnis/read/3490280/menko-luhut-vatikan-akan-bantu-ri-hadapi-larangan-produk-sawit-masuk-eropa> , diakses 24 Juni 2022
- Mayr, Stefan (2020) "Palm oil, the RED II and WTO law: EU sustainable biofuel policy tangled up in green?", <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/reel.12386>, diakses 20 Mei 2022
- PASPI, 2018, "Menghadapi Ideologi Anti Sawit di Uni Eropa" *Jurnal Monitor Isu Strategis Sawit*, 4 (24) : 1206.
- Sjahri, Sulthon, 2021. "Desain Klasterisasi Tujuan Pasar Ekspor Indonesia", *Jurnal Hubungan Luar Negeri*, 6 (1) : 4

- Veri, Jan Horas, (2019), *Industri Sawit Indonesia dalam Perspektif Minyak Nabati Global*, Kesatuan Press : Bogor
- Woltjer et al, (2017), Study Report on Reporting Requirements on biofuels and Bioliquids , European Commission, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/20170816_iluc_finalstudyreport.pdf